



**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL
PELAKSANAAN RKPD PROVINSI BANTEN**

TRIWULAN III

TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat karunia serta ridho-Nya Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi mengenai pencapaian atas kinerja sasaran, program kegiatan yang telah ada dalam dokumen RKPD Tahun 2023 Provinsi Banten beserta kendala/permasalahan serta rencana tindak lanjut dalam penyelesaiannya.

Dalam rangka penjabaran pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan di daerah yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 245 dimana menjelaskan bahwa Kepala Bappeda Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi.

Laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan serta bermanfaat bagi pihak terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah di Wilayah Provinsi Banten.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, Juli 2023

KEPALA,

Ttd.

Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM

NIP. 19690219 200112 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Ruang Lingkup	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 3
1.4. Tujuan.....	I - 5
1.5. Metode Evaluasi RKPD.....	I - 5
1.6. Sistematika Penulisan.....	I - 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023	II - 1
2.1. Keselarasan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2023	II - 1
2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas.....	II - 5
BAB III EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 	III - 1
3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro	III - 1
3.2. Capaian Kinerja Utama Daerah Tahun 2023	III - 12
3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan I Tahun 2023 ...	III - 15
3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023	III - 22
BAB IV ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	IV - 1
4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Triwulan II TA. 2023	IV - 1
4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah Triwulan II TA. 2023...	IV - 1
4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan	IV - 6
BAB V PENUTUP.....	V - 1

RINGKASAN

Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD di Provinsi Banten Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPD dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Belanja Daerah pada APBD TA 2023 sebesar Pada APBD 2023 Provinsi Banten Belanja APBD sebesar Rp. 11.774.651.290.753 dan terealisasi sebesar Rp. 7.019.446.202.351,41 atau 59,61%.

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023-2026 sebanyak 33 Indikator, dimana yang telah tercapai sampai dengan Triwulan III sebanyak 14 indikator progress dan sebanyak 19 indikator mencapai target kinerja 2023. Hal lainnya pada capaian Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di 34 Perangkat Daerah, sebanyak 15 indikator telah mencapai target, 39 indikator yang dalam progress pencapaian di akhir tahun dan ada 32 indikator yang belum bisa terhitung pencapaiannya pada periode triwulanan III.

Secara kinerja sub kegiatan rata-rata capaian dari seluruh Perangkat Daerah sebesar 70,30% dan rata-rata capaian kinerja keuangannya sebesar 71,74%. Adapun yang masih perlu secepatnya di dorong untuk percepatan kinerja adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman , Dinas PUPR dan Dinas Kelautan Perikanan.

Pelaksanaan RKPD pada Triwulan III TA 2023 secara umum terkendala proses lelang dan implementasi P3DN, ada juga terkait e-katalog yang beberapa item belum semua tersedia.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Triwulan III RKPD Tahun 2023 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai *feed back* dalam pelaksanaan program pembangunan periode selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan teknis, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD provinsi, yang mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi, evaluasi pelaksanaan RKPD 2023 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan menengah daerah RPD 2023-2026, hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana tujuan dan sasaran daerah, serta pelaksanaan pengendalian Paerangkat Daerah mulai dari sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, yang dilaksanakan melalui APBD provinsi;

2. Mengidentifikasi kendala dan hasil realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen RPD 2023-2026 dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional.

Bappeda melaksanakan evaluasi berupa pemantauan dan supervisi setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi. Hasil evaluasi dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan RKPD provinsi tahun berikutnya. Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

1.2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

1. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun telah melalui tahapan sesuai ketentuan dan mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, sehingga dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan sistem rencana pembangunan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dengan tujuan untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan yang disusun telah menindaklanjuti atau merupakan turunan dari perencanaan

pembangunan yang mempunyai lingkup lebih luas dan waktu yang lebih lama;

3. Evaluasi hasil untuk memastikan dan mengetahui secara objektif kesesuaian antara hasil capaian rencana pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dan kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 ;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.4. TUJUAN

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara RKPD dengan RPJMD/RPD dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat menjamin bahwa:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
2. Rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD/RPD Provinsi;
3. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional; dan
4. Sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD Provinsi

1.5. METODE EVALUASI RKPD

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Kepala BAPPEDA provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi, dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD provinsi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA provinsi melakukan perbaikan/penyempurnaan, dan Kepala BAPPEDA provinsi melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD provinsi kepada Gubernur, kemudian Gubernur menyampaikan laporan ke Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.

Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pada kegiatan pengendalian evaluasi yang didokumentasikan dalam buku ini adalah evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2023. Adapun metode evaluasi RKPD Provinsi Banten menggunakan:

- a. Pendekatan *gap analysis* (analisis kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD;
- b. Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga Triwulan III). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan.

Tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Bappeda Provinsi Banten menghimpun dokumen hasil realisasi kinerja seluruh Perangkat Daerah, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Renstra dan Renja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- b. Hasil realisasi kinerja dan anggaran pada Triwulan III Tahun 2023.

2. Pelaksanaan

Bappeda Provinsi Banten melakukan evaluasi hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2023 melalui input realisasi kinerja dan

keuangan dari seluruh Perangkat Daerah, berdasarkan input tersebut seluruh Pendamping Perangkat Daerah melakukan verifikasi, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen hasil realisasi kinerja Triwulanan, dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Renstra dan Renja Perangkat Daerah kemudian dicatat untuk dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

3. Pelaporan

Kepala Bappeda menyampaikan laporan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2023 berdasarkan hasil akhir verifikasi Pendamping dari seluruh Perangkat Daerah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Triwulan III tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

BAB III : EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

BAB IV : ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

BAB V : PENUTUP

BAB II

KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan terhadap Kebijakan umum dan Program pembangunan dan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan tahun 2023. Pada tahun pengendalian 2023 ini dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang merupakan pengganti RPJMD 2017-2022 yang telah berakhir periodesasinya.

2.1. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas Yang Disertai Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026 yang terdapat dalam dokumen RPD, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 dan program pembangunan tahun 2023 harus berorientasi pada pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, visi misi yang digunakan pada RPD mengacu pada dokumen

RPJPD 2005-2025 yang diselaraskan dengan mendukung tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 seperti pada tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.
Sasaran dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2023

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	52,83	58,13	71,06
				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,644	0,665	0,695
				Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,71	7,74	7,79
			Tingkat Pengangguran Terbuka 8,98% (2021) menjadi 8,20% (2026)	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	64,48	65,19	66,24
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	8,93	9,11	9,40
				dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,02	13,75	14,30
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,02	70,40	70,83

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
					Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	24,50	23,50	22,00
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	91,67	93,07	93,91
				Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	52,63	55,03	58,63
					Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	48,67	49,42	51,67
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi 4,44% (2021) menjadi 5,27 - 5,41 (2026)	Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,87	3,97	6,82
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,93	4,99	5,69
					LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	1,84	2,44	4,24
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,30	4,39	4,66
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,56	0,68	1,04

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
			Indeks Williamson 0,625 (2021) menjadi 0,618 (2026)	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	Tinggi	tinggi	Sangat tinggi
			Indeks Gini 0,363 (2021) menjadi 0,336 (2026)	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Tahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.033	12,168	12.573
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 14,48% (2021) menjadi 20% (2026)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,94	62,99	63,14
				Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	149,08	147,37	140,02
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi 61 (2021) menjadi 81 (2026)	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	65,88	69,77	80,00
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	55,89	82,20	87,60
					Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2	2-3	2-3
					Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,45	3,47	3,53

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”								
No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021 (Awal)	Target Tahun 2023	2026 (Akhir)
				Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh

2.2. Keselarasan Rencana Tujuan, Sasaran Daerah dan Program Prioritas Tahun 2023

Guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2022, ditetapkan pagu indikatif program sesuai dengan prioritas, seperti pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7	22
2	Dinas Kesehatan	5	16
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	24
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8	19
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3	12
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12
7	Dinas Sosial	6	18
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6	20
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14	36
10	Dinas Ketahanan Pangan	5	13
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15	29
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12
13	Dinas Perhubungan	4	16
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	13
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	14
16	Dinas Penanaman Modal	6	14

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	14
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	14
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	6	28
20	Dinas Pariwisata	5	17
21	Dinas Pertanian	7	23
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	17
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	22
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3	11
25	Biro Hukum	2	7
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	2	7
27	Biro Umum dan Perlengkapan	1	10
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2	8
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	3	9
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	1	7
31	Sekretariat DPRD	2	17
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4	19
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	15
34	Badan Pendapatan Daerah	2	9
35	Badan Kepegawaian Daerah	2	12
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	10
37	Badan Penghubung	2	7
38	Inspektorat	3	12
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	12
JUMLAH		309	938

2.2.1 Relevansi Program RPD Dengan RKPD

Dalam RPD Provinsi Banten tahun 2023-2026 direncanakan terdapat 176 Program, dan dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan sebanyak 309 program dan 938 Kegiatan yang tersebar ke seluruh Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD. Hal tersebut dikarenakan adanya penyesuaian nomenklatur program yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Apabila merujuk pada hasil pemetaan terhadap program RPD dan Program nomenklatur, secara keseluruhan mengindikasikan bahwa seluruh program yang ada di dalam RPD dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan urusannya masing-masing.

2.2.2 Relevansi Program RKPD Dengan APBD

Dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2023 direncanakan sebanyak 309 program yang direncanakan dalam APBD. Program-program yang terdapat dalam RKPD yaitu berjumlah 309 program seluruhnya dianggarkan dalam APBD, hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh program dalam RKPD menjadi prioritas dalam pembangunan, meskipun arah dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 Provinsi Banten bersifat tematik.

Terkait dengan anggaran APBD 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 11.774.651.290.735 dan terealisasi sebesar Rp. 7.019.446.202.351,41 atau 59,61%.

BAB III
HASIL PELAKSANAAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

3.1. Capaian Kinerja Indikator Makro

Penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan tingkat inflasi. Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (*impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pelaku pembangunan lainnya. Capaian indikator makro Provinsi Banten pada Tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Indikator Makro Provinsi Banten Tahun 2023

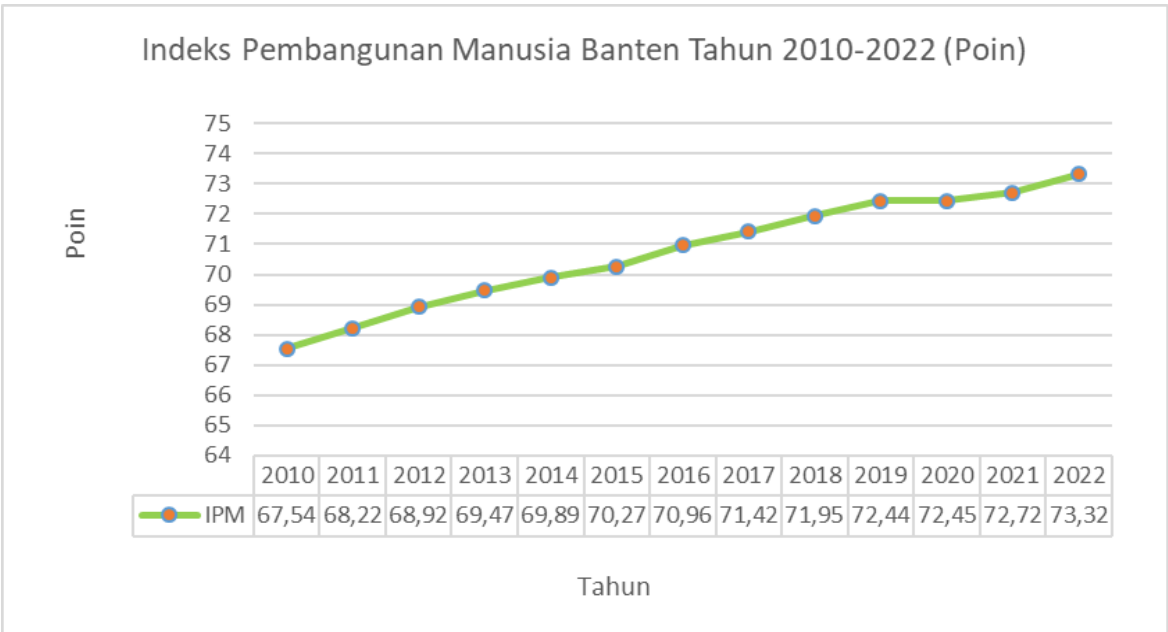
Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Realisasi Triwulan III	Keterangan	Sumber data
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,32	73,59	73,32	Progres	Realisasi Tahun 2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,03	5,20	4,97	Progres	Realisasi Tw III 2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,09	7,9	7,52	Tercapai	Realisasi Agustus 2023
Tingkat Kemiskinan	Persen	6,24	6,10	6,17	progres	Realisasi Maret Tahun 2023
Indeks Gini	Poin	0,377	0,365	0,368	Progres	Realisasi Tahun Maret 2023

Sumber: RKPD-P 2023, BPS Provinsi Banten

3.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat ini digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Banten Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten terepresentasikan melalui capaian IPM Banten Tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar 73,32 poin dan belum ada rilis terbaru sampai bulan September dari BPS. Nilai IPM

73,32 ini telah mencapai angka target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 73,27.

Ketercapaian IPM Provinsi Banten di tahun 2022 termasuk pada klasifikasi “tinggi” dan menunjukkan peningkatan sebesar 0,6 poin jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara nasional IPM Provinsi Banten lebih baik dari IPM nasional yaitu 72,91poin, dimana Banten menempati peringkat ke-8 dengan status IPM tertinggi. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa penduduk Banten dapat lebih meningkatkan akses terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Peningkatan IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Umur Harapan Hidup Banten pada tahun 2022 mencapai 70,39 tahun. Dengan demikian, setiap penduduk Banten yang lahir pada tahun 2022 mempunyai harapan untuk hidup sampai usia 70 tahun. Sepanjang periode 2010 hingga 2022, Banten telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir selama 1,89 tahun.

Adapun Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 telah mencapai 13,05 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester II diperguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SLTA.

Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2022 telah mencapai 9,13 tahun dengan pertumbuhan yang selalu positif. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III), Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan, dalam periode setahun terakhir ini, peningkatan kualitas pendidikannya lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM dengan kriteria tinggi ini didukung oleh berbagai faktor antara lain; 1) Penyediaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp.3,10 triliun atau 25,92% dari belanja daerah (ketentuan minimal 20%); 2) Penyediaan alokasi belanja kesehatan yang mencapai Rp1,35 triliun atau 13,64% dari belanja

daerah (ketentuan minimal 10%); 3) Akses dan mutu pendidikan dan yang semakin merata melalui penyediaan infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kesehatan. Dukungan pemerintah kabupaten kota dan peran serta dunia usaha/masyarakat dalam rangka penyediaan RS Swasta di Banten; 4) Kemudahahan perijinan pendirian RS dan lembaga pendidikan dan pelatihan mandiri; 5) Daya beli masyarakat semakin meningkat. Strategi kedepan RS Daerah yang telah dibangun akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan yang mumpuni menuju *health tourism*

Tabel 3.2
Target Komponen Indikator IPM Tahun 2023

No	Indikator IPM	Realisasi s/d Thn 2023	Target Tahun 2023
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,96 tahun	70,40 Tahun
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15 tahun	13,75 Tahun
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	9,13 tahun	9,11 Tahun
4	Pengeluaran Perkapita	Rp 12.216.000	Rp. 12.168.000

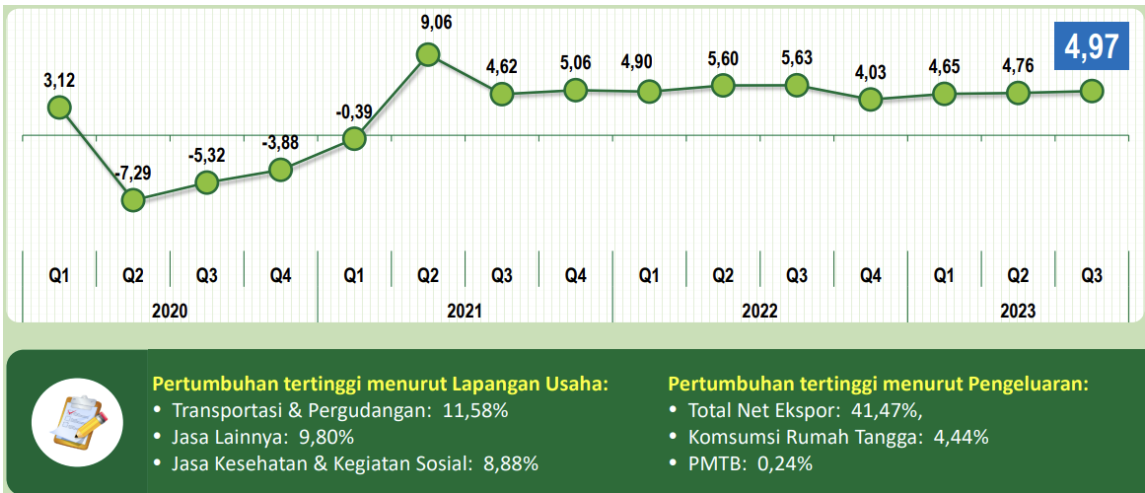
Sumber:BPS Provinsi Banten

3.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah.

Aktivitas ekonomi Indonesia cukup stabil, dipengaruhi adanya perayaan keagamaan Idul Fitri dan Idul Adha diantaranya pada sektor transportasi dan pariwisata yang mengalami peningkatan karena tidak ada lagi pembatasan mobilitas dan juga pengunjung restoran yang meningkat seiring libur panjang perayaan keagamaan.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi TW II 2023



Sumber:BPS Provinsi Banten

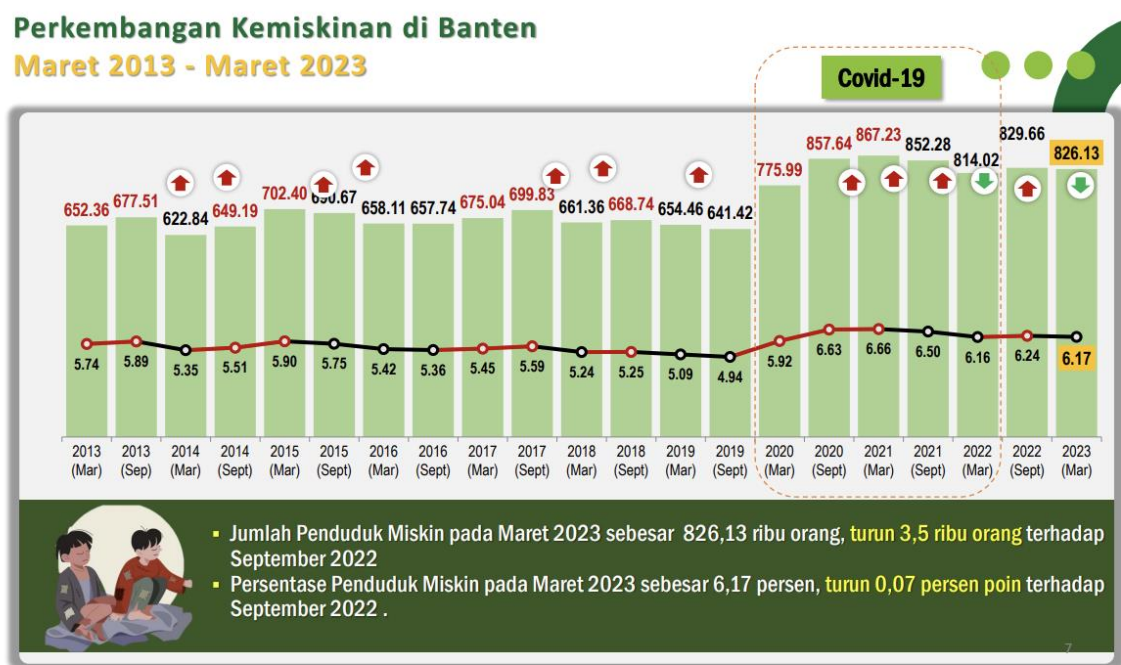
Ekonomi banten pada Triwulan III tahun 2023 ini sebesar 4,97%. Secara kumulatif, ekonomi Banten triwulan III-2023 dibandingkan dengan triwulan III-2022 tumbuh sebesar 4,80 (c-to-c). Seluruh leading sector, yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Real Estat serta Pertanian melanjutkan tren positif sejak triwulan I-2022. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada TW III 2023 ada 3 sektor yaitu, Transportasi pergudangan naik 11%, jasa lainnya 9,8% dan jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8%. Beberapa lapangan usaha yang memiliki share besar terhadap perekonomian Banten pada triwulan III-2023 adalah sector industry sebesar 30,81%, Perdagangan besar 12,45% dan Transportasi dan pergudangan 11,42%. Pertumbuhan didorong terutama oleh kinerja positif Industri Makanan Minuman, Industri Logam Dasar; Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik; serta Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik.

Untuk komponen pengeluaran pertumbuhan tertinggi secara c to c ada pada sektor net ekspor 25,34%, konsumsi Rumah tangga 3,4% dan PMTB 2,47%. Pertumbuhan ini terjadi akrena ada peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan dan adanya hari besar keagamaan Idul Adha yang meningkatkan mobilitas masyarakat.

3.1.3. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten , Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2023 sebesar 6,17 persen, meningkat 0,01 persen poin terhadap Maret 2022.

Gambar 3.3 Perkembangan Kemiskinan Tahun 2013-2023



Sumber:BPS Provinsi Banten

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 826,13 ribu orang, turun 3,5 ribu orang jika dilihat dari angka Penduduk miskin September 2022. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 naik menjadi 6%, dibanding pada September 2022 sebesar 5,89%. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 6,79%, turun dibanding September 2022 yaitu 7,29%. Selama September 2022 sampai dengan Maret 2023, Garis Kemiskinan Provinsi Banten naik sebesar 3,34 persen, yaitu dari 598 ribu rupiah per kapita perbulan pada September 2022 menjadi 619 ribu rupiah per kapita perbulan pada Maret 2023. Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada Maret 2023, komoditi makanan menyumbang sebesar 72,45 persen pada garis

kemiskinan. Adapun komoditi makanan yang menjadi penyumbang garis kemiskinan adalah beras, telur,daging ayam,roti dan mie instan.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp598.748,- /kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp433.368,- (72,38 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp165.380,- (27,62 persen). Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banten memiliki 4,42 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.646.466,-/rumah tangga miskin/bulan.

Provinsi banten dalam rangka penurunan kemiskinan telah melaksanakan berbagai program pembangunan secara terintergrasi dengan melibatkan berbagai urusan pemerintahan antara lain: 1).Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dalam rangka percepatan arus orang, mobilisasi barang, dan jasa semakin meningkat. 2).Pembangunan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni. 3).Penanganan kemiskinan melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Tabel 3.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022–Maret 2023

No	Daerah/Tahun		Persentase Penduduk Miskin
1	Perkotaan		
		Maret 2022	5,73
		September 2022	5,89
		Maret 2023	6,00
2	Perdesaaan		
		Maret 2022	7,46
		September 2022	7,29
		Maret 2023	6,79

Sumber: BPS Provinsi Banten

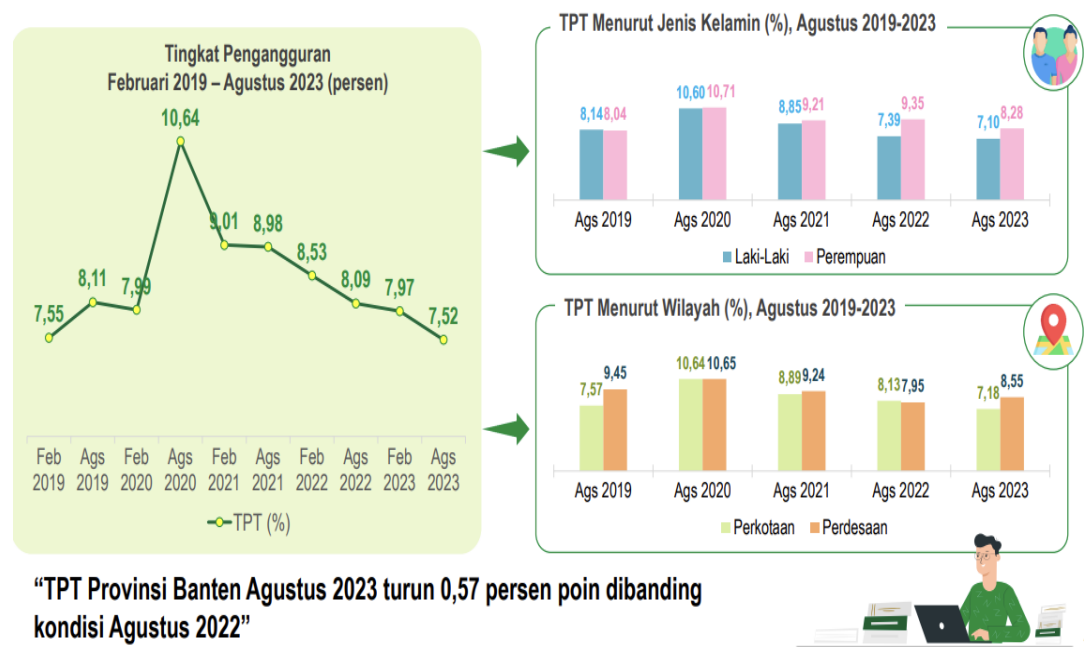
3.1.4. Tingkat Pengangguran

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Provinsi Banten. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Pada Agustus 2023 tingkat pengangguran sebesar 7,52% atau 448ribu orang menganggur. Dari 5,97 juta orang angkatan kerja, sebanyak 448 ribu orang (7,52 persen) di antaranya merupakan pengangguran. Dibandingkan Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,57 persen poin. Tingkat pengangguran turun lebih banyak pada penduduk perempuan dibandingkan pada laki-laki. Sementara menurut wilayah, tingkat pengangguran meningkat di perdesaan. Tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun dan pada tahun 2023 telah mencapai angka yang lebih rendah dibanding sebelum pandemi. Membaiknya kondisi perekonomian mampu menyerap tenaga kerja. Proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 50,99%. Penambahan penduduk yang bekerja dengan status tersebut turut mendorong peningkatan proporsi pekerja formal yang mencapai 53,69%.

Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Banten Agustus 2023 memperlihatkan Jumlah angkatan kerja pada sebanyak 5,52 juta orang. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 turun 0.28 persen poin menjadi 64,44%. Selama setahun terakhir, TPAK Laki-laki Mengalami Kenaikan, sementara TPAK Perempuan Turun. Pada Agustus 2023, sektor dengan jumlah tenaga kerja terbesar adalah Perdagangan, Industri Pengolahan dan Pertanian, yaitu masing-masing sebesar 21,51 persen; 21,00 persen dan 12,01 persen dari total penduduk bekerja. Proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 50,99%. Penambahan penduduk yang bekerja dengan status tersebut turut mendorong peningkatan proporsi pekerja formal yang mencapai 53%.

Gambar 3.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran 2020-2023



Sumber:BPS Provinsi Banten

3.1.5. Indeks Gini

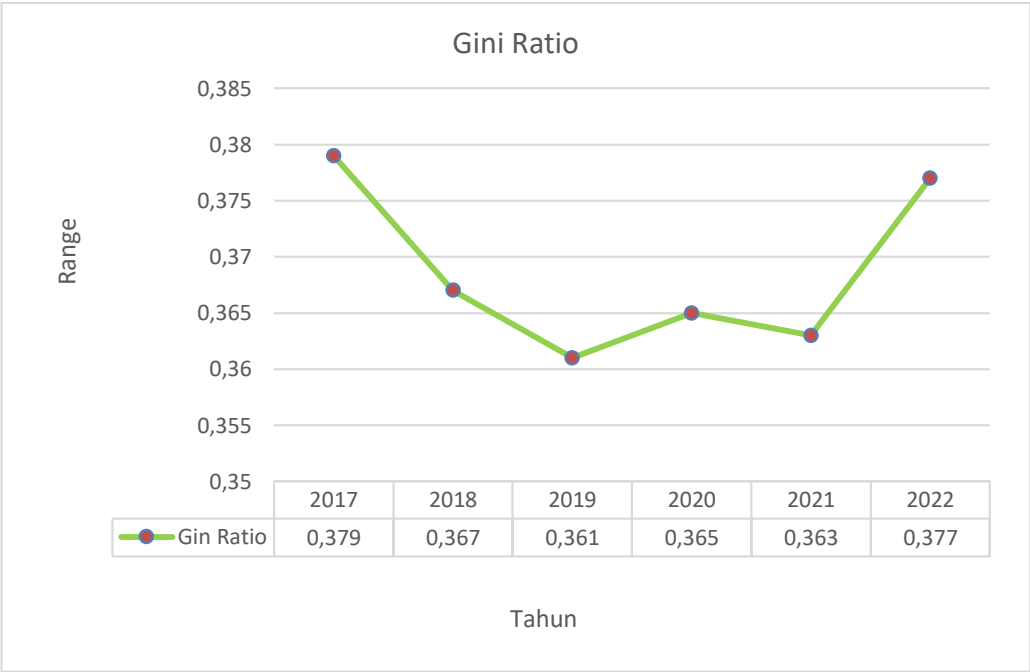
Salah satu ukuran untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*) digunakan indikator ketimpangan pengeluaran. Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*income disparity*).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Banten bahwa Indeks Gini Provinsi Banten Periode Maret Tahun 2023 mencapai sebesar 0,368 poin yang berarti terdapat Penurunan sebesar 0,002 poin dibanding periode September 2022 yaitu 0,377 poin.

Tercatat bahwa pengeluaran perkapita per bulan penduduk kelompok 20 persen berpengeluaran tinggi pada Maret 2023 mengalami penurunan 0,81 poin persen, sementara pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen terbawah dan kelompok 40 persen berpengeluaran menengah naik masing-masing sebesar 0,53 poin persen dan sebesar 0,28 poin

persen. Berdasarkan target perubahan RKPD 2023 perubahan dimana gini ratio ditargetkan 0,363 dan terealisasi 0,368.

Gambar 3.5 Perkembangan Gini Ratio Tahun 2017-2022



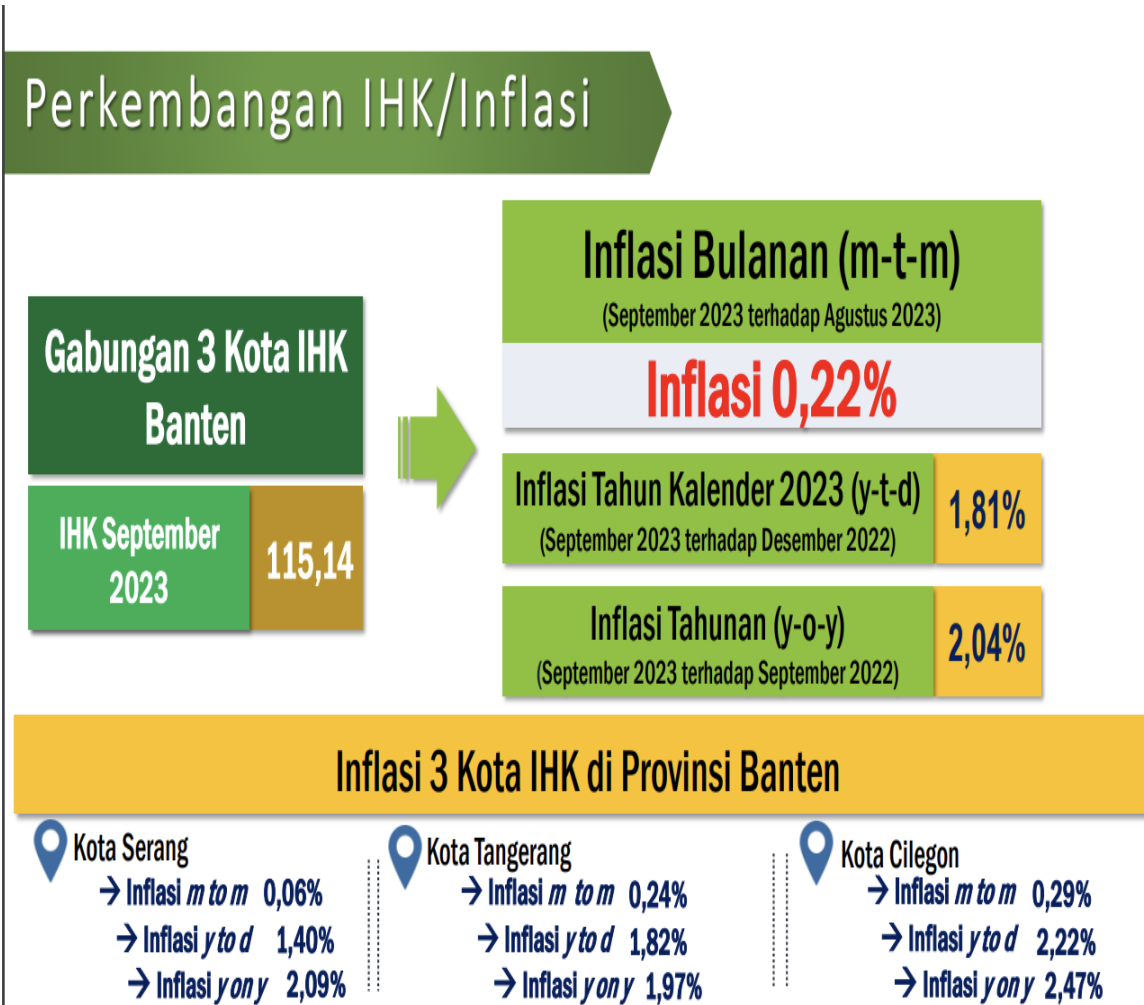
Sumber: BPS Provinsi Banten

3.1.6. Inflasi

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi harus terus dijaga agar tetap stabil karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Inflasi pada bulan September 2023 tercatat 2,04% yang dihitung dari 3 Kota di Provinsi Banten andil inflasi di Maret disebabkan pada komoditas beras, sewa rumah dan rokok.

Gambar 3.6 Perkembangan Inflasi September 2023



Sumber :BPS Provinsi Banten

Tabel 3.4 Komoditi Penyebab Inflasi pada September 2023

JENIS KOMODITI MAKANAN PENYEBAB INFLASI			
Perkotaan (%)		Perdesaan (%)	
15,36	Beras	Beras	21,75
14,92	Rokok kretek filter	Rokok kretek filter	15,55
4,55	Daging ayam ras	Telur ayam ras	2,92

JENIS KOMODITI MAKANAN PENYEBAB INFLASI			
Perkotaan (%)		Perdesaan (%)	
3,86	Telur ayam ras	Daging ayam ras	2,81
2,78	Mie instan	Roti	2,75

3.2. Capaian Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2023 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi berdasarkan tabel dibawah dari 33 Indikator Pemerintah daerah yang telah tercapai sebanyak 19 indikator dan sebanyak 14 indikator berprogress mencapai target, dijelaskan rinci sebagai berikut:

Tabel.3.4
Realisasi Indikator Kinerja Utama Daerah

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi s/d tw III Tahun 2023	Keterangan
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Tingkat Kemiskinan	6,10	6,17	Progress
			Tingkat Pengangguran Terbuka	7,9	7,52	Tercapai
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (satuan: nilai)	73,59	73,32	progres
		Meningkatnya Kualitas Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (satuan: nilai)	58,13	52,83	Progres
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Perbatasan	Indeks Desa Membangun (satuan: nilai)	0,665	0,6803	Tercapai

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi s/d tw III Tahun 2023	Keterangan
		Meningkatnya Pelayanan Sosial	Proporsi penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (satuan: persen)	7,74	7,71	Progres
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (satuan: persen)	65,19	65,94	Tercapai
		Meningkatnya Pemerataan Akses	Rata-rata Lama Sekolah (satuan: tahun)	9,11	9,13	Tercapai
		dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (satuan: tahun)	13,75	15	Tercapai
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (satuan: tahun)	70,40	70,96	Tercapai
			Prevalensi Stunting pada Balita (satuan: persen)	23,50	20	Tercapai
		Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (satuan: nilai)	93,07	92,79	Progres
		Terbentuknya Karakter dan Jati Diri Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (satuan: nilai)	55,03	52,63	Progres
			Indeks Pembangunan Pemuda dan Olahraga (satuan: nilai)	49,42	48,67	Progres
2	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan	Terwujudnya Pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,70-52	4,97	Tercapai
			Indeks Williamson	0,625	0,620	Tercapai
			Indeks Gini	0,363	0,368	Progres
		Meningkatnya Iklim Investasi dan Usaha	Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (satuan : persen)	3,97	5,47	Tercapai

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi s/d tw III Tahun 2023	Keterangan
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan	LPE sektor industri (Satuan: persen)	4,99	5,81	Tercapai
			LPE Sektor Perdagangan (satuan: persen)	2,44	4,42	Tercapai
		Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	LPE Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan: persen)	4,39	4,34	Progres
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Kelautan	LPE Sektor Pertanian dan Kelautan (satuan: persen)	0,68	0,54	Progres
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Indeks Daya Saing Infrastruktur (satuan: level)	tinggi	tinggi	Tercapai
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita Pertahun yang Disesuaikan (Satuan: Ribu Rupiah)	12.168	12.216	Tercapai
3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari	Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	17	14,48	Progres
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (satuan: nilai)	62,99	63,52	Tercapai
		Meningkatnya Mitigasi, Kesiapsiagaan, dan Tanggap Darurat Bencana	Indeks Risiko Bencana (satuan: nilai)	147,37	144,51	Progres
4	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa	Indeks Reformasi Birokrasi	66	66,11	Tercapai

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Tahun 2023	Realisasi s/d tw III Tahun 2023	Keterangan
		Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi (satuan: nilai)	69,77	67,20	Progres
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (satuan: nilai)	82,20	55,89	Progres
			Indeks Persepsi Anti-Korupsi (satuan: nilai)	2-3	2,5	Tercapai
			Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (satuan: nilai)	3,47	3,99	Tercapai
		Meningkatnya Stabilitas Ketahanan Nasional di Provinsi Banten	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Banten (satuan: level)	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tercapai

Sumber: Data BPS dan Olahan Bappeda

3.3. Rekapitulasi Capaian Kinerja Urusan Triwulan III Tahun 2023

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang menjadi Indikator urusan dan tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 15 indikator yang telah tercapai targetnya di 2023, sebanyak 39 indikator yang dalam progress pencapaian di triwulan berikutnya atau di Triwulan IV dan ada 32 indikator yang belum bisa terhitung pencapaiannya pada periode triwulanan, adapun rincian kinerja terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Realiasi Kinerja Urusan S/d Triwulan III Tahun 2023

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	Ket Kinerja
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	BIDANG PENDIDIKAN				
1	Cakupan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	93,92	Progress
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 Tahun	Persen	71,34	69,08	Progres
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 Tahun penyandang disabilitas dalam Pendidikan Khusus	Persen	63,04	18,11	Progress
4	Persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) Lulusan SMK	Persen	12,7	7,97	Progress
	BIDANG KESEHATAN				
5	Cakupan Layanan Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif Dalam Penurunan Stunting	Persen	40	40	
6	Persentase Capaian Rumah Sakit Pendidikan	Persen	76,92	76,92	Progres
7	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	81	123	
8	Rasio Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	Kasus	4,7	7,75	
9	Persentase Ketercapaian Indikator SPM Rumah Sakit	Persen	100	100	
	BIDANG KEBUDAYAAN				
10	Indeks kepuasan pengunjung museum daerah dan taman budaya dari total keseluruhan pengunjung museum dan taman budaya	Nilai	3,20		
11	Persentase Peningkatan Kualitas Pembangunan Kebudayaan	Persen	5		
	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
12	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	40		

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	Ket Kinerja
13	Persentase Rumah Tangga yang Menghuni Rumah Layak dan Terjangkau	Persen	32,42		
14	Luas Permukiman Kumuh	Ha	277,63		
	BIDANG SOSIAL				
15	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	Persen	5,40	6,98	Tercapai
	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
16	Persentase Cakupan pembangunan gedung, bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Provinsi	Persen	100	100	Tercapai
17	Persentase Capaian Pelayanan Akses Air Minum regional, IPAL regional dan Pengelolaan Sampah Regional	Persen	19,76		
18	Persentase Kapasitas Tampung Sumber Daya Air	Persen	0,87		
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	100	96,90	Progres
20	Persentase Luas Layanan Irigasi	Persen	62,81		
21	Persentase Penanganan Pencegahan Banjir dan Abrasi	Persen	43,86	28,66	Progres
22	Tingkat Kemantapan Jalan dan Jembatan	Persen	94	94,25	Progres
	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
23	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,55	0,59	
24	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100	100	
25	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	Persen	100	100	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
26	a. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	74,18		
27	b. Indeks Kualitas Air (IKA)		54,44		
28	c. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		80,10		
	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	Ket Kinerja
29	Angka Kelahiran Tota TFR (<i>Total Fertility Rate</i>) WUS usia 15-49 tahun	Nilai	2,38	2,11	
	BIDANG PENANAMAN MODAL				
30	Capaian realisasi penanaman modal (PMDN + PMA)	Triliyun Rupiah	60 T	24,9 T	
31	Indeks Kepuasan Pelayanan Perijinan	Nilai	86,22	89,72	
	BIDANG KEARSIPAN				
32	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	Nilai	BB	BB	Tercapai
	BIDANG PERSANDIAN				
33	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	273	583	Tercapai
	BIDANG PANGAN				
34	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Nilai	70,73	73,78	Tercapai
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
35	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	91,80	91,70	Progress
36	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,25	3,03	Progress
	BIDANG TENAGA KERJA				
37	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Nilai	68,26	57	Progress
	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
38	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Nilai	0,50	0,45	Progress
39	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Nilai	50	49	Progress
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
40	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	69,26	69,09	Progress
41	Indek Perlindungan Anak	Nilai	74,55	62,92	progress
	BIDANG PERPUSTAKAAN				
42	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	14,32	Progress
43	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	67,30	65,70	Progress
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
44	Persentase Cakupan Database Kependudukan Tingkat Provinsi	Persen	100	100	Progress

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	Ket Kinerja
	BIDANG STATISTIK				
45	Persentase Ketersediaan Data Base Statistik Sektoral	Persen	100	100	Progress
	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
46	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Persen	25	16,05	Progress
47	Persentase Usaha Kecil yang Naik Kelas sesuai kluster	Persen	5	3	Progress
	BIDANG PERHUBUNGAN				
48	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 100 ribu Keberangkatan	Persen	19,70		
49	Rasio Konektivitas Provinsi	Persen	0,72	0,70	Progress
50	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	82,00	79,60	Progress
	BIDANG PERTANAHAN				
51	Persentase Pemenuhan Sub Urusan Pertanahan	Persen	100		
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
52	Persentase Penurunan Status Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Persen	14,22	18,98	Progress
53	Persentas Desa Kategori Maju	Persen	13,49	12,86	progres
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
54	Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral	Persen	55,25	26,08	progres
55	Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan	Persen	5	2,46	Progress
56	Rasio Elektrifikasi	Persen	98,2	99,99	Tercapai
	BIDANG KEHUTANAN				
57	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	35,10	39,06	Tercapai
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
58	NTN Sub Sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	POIN	102	100,19	Progress
59	Tingkat Produksi Sektor Perikanan	Ton	246.569	135.849,19	

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	Ket Kinerja
	BIDANG PARIWISATA				
60	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Asing)	Orang	20.060.922	8.483.861	Progress
	BIDANG PERDAGANGAN				
61	Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,48	33,35	tercapai
	BIDANG PERINDUSTRIAN				
62	Persentase Kontribusi PDRB sektor industri terhadap PDB sektor Industri	Persen	6,43	13,21	tercapai
	BIDANG PERTANIAN				
63	Produksi Peternakan	Ton	225.907	142954	
64	Produksi Hortikultura	Ton	23.714	11345	
65	Produksi Tanaman Pangan	Ton	2.051.611	1092688	
66	Produksi Perkebunan	Ton	50.855	28616	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
	SEKRETARIAT DAERAH				
67	Indeks Kelembagaan	Nilai	41 - 60		
68	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	60		
69	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	80,80	64,5	Progress
70	Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	81,81	67,18	Progress
71	Nilai komponen pelaporan SAKIP Provinsi	Nilai	10,77	10,05	Progress
72	Persentase realisasi rumusan kebijakan Administrasi Pembangunan yang diimplementasikan	Persen	100	11,17	Progres
73	Persentase realisasi rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah yang di implementasikan	Persen	100	25,33	Progres
74	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan	Persen	100	10	Progress
75	Persentase realisasi pelayanan Pimpinan Daerah	Persen	100	48	Progress
76	Persentase realisasi pelayanan SETDA	Persen	100		

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	Ket Kinerja
77	Skoring/Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/ Nilai	4,24	2,70	Progress
	SEKRETARIAT DPRD				
78	Tingkat Dukungan dan Fasilitas DPRD	Persen	100	41,24	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
	INSPEKTORAT DAERAH				
79	Jumlah Unit Kerja yang berpredikat ZI	Unit Kerja	1	0	Progress
80	Maturitas SPIP	Nilai	3,14	3,04	Progress
81	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Internal	Nilai	14	15,30	Tercapai
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
	KEUANGAN				
82	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tercapai
83	Kemandirian Keuangan	Persen	63,55	73,80	tercapai
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
84	Indeks Inovasi Daerah	Level	Sangat Inovatif (60.01)	Inovatif (50,41)	Progres
	KEPEGAWAIAN				
85	Indeks Merit Sistem	Nilai	321,5	321,5	Tercapai
86	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	24,48	21,73	Tercapai
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
87	Indeks Profesional Aparatur Dimensi Kompetensi ASN	Persen	10,23		
	PERENCANAAN				
88	Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan dan Pengukuran	Kategori/ Nilai	45	41,85	Progress
	PENGHUBUNG				
89	Capaian Pelayanan Penghubung	Indeks	4		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
90	Indeks Demokrasi Indonesia Banten	Nilai	77,55	75,93	Progress

	INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA S/D TW II 2023	Ket Kinerja
91	Persentase konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM yang ditangani	Persen	100	100	tercapai
	NON URUSAN				
92	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80		

Sumber: Data olahan Bappeda 2023

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2023

Adapun capaian pelaksanaan kinerja program, berdasarkan Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Triwulan III Tahun 2023, adapun yang masih belum baik dalam pencapaian realisasi anggaran adalah Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Bidang Perkejaan Umum, Bidang Perindustrian Perdagangan, adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Per Urusan TW III tahun 2023

PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		3.127.897.674.431	1.722.287.726.236	55,06
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.450.000.000	3.146.043.085	42,23
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.120.447.674.431	1.719.141.683.151	55,09
DINAS KESEHATAN		1.155.420.581.657	629.957.746.315	54,52
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.155.420.581.657	629.957.746.315	54,52
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1.105.636.866.000	326.098.015.695	29,49

PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.105.636.866.000	326.098.015.695	29,49
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		521.212.000.000	23.543.069.114	4,52
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	500.000.000	22.195.945	4,44
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.712.000.000	23.520.873.169	4,52
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		92.190.000.000	49.803.282.712	54,02
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	92.190.000.000	49.803.282.712	54,02
DINAS SOSIAL		112.528.000.000	50.190.936.666	44,60
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	112.528.000.000	50.190.936.666	44,60
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI		87.498.000.000	55.631.138.715	63,58
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	87.498.000.000	55.631.138.715	63,58
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA		45.386.200.000	30.449.522.549	67,09
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.264.915.000	907.535.772	40,07
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	36.237.885.000	24.857.125.144	68,59

PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	PERLINDUNGAN ANAK			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.883.400.000	4.684.861.633	68,06
DINAS KETAHANAN PANGAN		50.389.000.000	16.426.015.466	32,60
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.389.000.000	16.426.015.466	32,60
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		77.660.000.000	49.935.251.706	64,30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	11.169.448.000	5.532.524.549	49,53
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	66.490.552.000	44.402.727.157	66,78
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		32.129.000.000	18.142.025.065	56,47
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32.129.000.000	18.142.025.065	56,47
DINAS PERHUBUNGAN		72.735.000.000	45.562.477.315	62,64
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	72.735.000.000	45.562.477.315	62,64
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		68.806.000.000	40.893.028.214	59,43
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	65.000.178.900	39.359.697.845	60,55
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.750.278.500	1.077.188.919	39,17
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.055.542.600	456.141.450	43,21
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		27.394.781.000	17.582.680.375	64,18

PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	27.394.781.000	17.582.680.375	64,18
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		35.549.844.000	20.727.171.912	58,30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	35.549.844.000	20.727.171.912	58,30
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		89.008.000.000	67.189.268.476	75,49
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	89.008.000.000	67.189.268.476	75,49
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		28.996.000.000	17.075.320.466	58,89
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.233.763.000	963.251.083	29,79
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	25.762.237.000	16.112.069.383	62,54
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		109.162.670.000	37.262.238.355	34,13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	109.162.670.000	37.262.238.355	34,13
DINAS PARIWISATA		49.641.000.000	25.218.773.322	50,80
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	49.641.000.000	25.218.773.322	50,80
DINAS PERTANIAN		119.095.000.000	66.724.570.868	56,03
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	119.095.000.000	66.724.570.868	56,03
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		44.158.000.000	25.400.857.954	57,52
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI	44.158.000.000	25.400.857.954	57,52

PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	DAN SUMBER DAYA MINERAL			
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		90.291.000.000	29.410.029.330	32,57
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.268.315.600	3.996.817.260	43,12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	81.022.684.400	25.413.212.070	31,37
SEKRETARIAT DAERAH		259.793.000.000	152.423.229.696	58,67
	SEKRETARIAT DAERAH	259.793.000.000	152.423.229.696	58,67
SEKRETARIAT DPRD		488.912.000.000	301.072.793.199	61,58
	SEKRETARIAT DPRD	488.912.000.000	301.072.793.199	61,58
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		54.461.000.000	32.799.174.476	60,23
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.550.000.000	1.450.971.920	40,87
	PERENCANAAN	50.911.000.000	31.348.202.556	61,57
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		3.206.997.052.647	2.773.790.342.363	86,49
	KEUANGAN	3.206.997.052.647	2.773.790.342.363	86,49
BADAN PENDAPATAN DAERAH		310.815.000.000	202.134.874.292	65,03
	KEUANGAN	310.815.000.000	202.134.874.292	65,03
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		65.584.000.000	27.565.987.952	42,03
	KEPEGAWAIAN	65.584.000.000	27.565.987.952	42,03
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		53.982.000.000	32.462.325.110	60,14
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.982.000.000	32.462.325.110	60,14
BADAN PENGHUBUNG		13.254.000.000	7.779.417.100	58,69

PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN	ANGGARAN	REALISASI	
			RP	(%)
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	13.254.000.000	7.779.417.100	58,69
INSPEKTORAT		71.643.000.000	43.482.011.169	60,69
	INSPEKTORAT DAERAH	71.643.000.000	43.482.011.169	60,69
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		106.425.621.000	80.424.900.168	75,57
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	106.425.621.000	80.424.900.168	75,57
	TOTAL	11.774.651.290.735	7.019.446.202.351	59,61

Tabel.3.7
Realisasi Capaian Kinerja Program Triwulan III tahun 2023

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	100,00	24,25	24,25
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	%	100,00	55,10	55,10
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Realisasi Capaian Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus DasarKebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	%	100,00	10,40	10,40
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang terjadi di wilayah	%	100,00	84,59	84,59

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	%	100,00	1,43	1,43
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Pendampingan Penanganan Pasca Bencana	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Pendampingan Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	100,00	-	0,00
Badan Pendapatan Daerah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Presentase Peningkatan Pajak Daerah	%	5,85	- 51,57	
		Presentase Peningkatan Retrebusi Daerah Dan Pendapatan Lain - Lain (%)	%	4,56	- 60,24	
BADAN PENGHUBUNG	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Cakupan Koordinasi Badan Penghubung terhadap Pemerintahan Daerah	Indeks	3,00	3,00	100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
BAPPEDA	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Ketercapaian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Ketercapaian Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	laporan /Dokumen	5,00	3,00	60,00
		Ketercapaian Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	laporan /Dokumen	5,00	2,00	40,00
		Ketercapaian Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Dokumen	5,00	-	0,00
		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persen	100,00	100,00	100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen Pengendalian dan evaluasi yang disusun sesuai target dalam satu tahun n	Persen	100,00	35,33	35,33
		Persentase dokumen perencanaan yang disahkan	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Ketersediaan data perencanaan pembangunan	Persen	100,00	-	0,00
		Persentase pengelolaan sistem informasi pembangunan dan pengendalian daerah	Persen	85,00	50,00	58,82
		Presentase Konsistensi Program RPJMD/ RPD kedalam RKPD	Persen	95,00	95,00	100,00
Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100,00	48,00	48,00
		Persentase Capaian Pelayanan Keprotokolan	Persen	100,00	48,00	48,00
Biro Hukum Sekretariat Daerah	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum dan HAM	%	100,00	50,00	50,00
		Persentase Dokumentasi Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	%	100,00	50,00	50,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Persentase Ketercapaian Kualitas Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	100,00	50,00	50,00
		Persentase Ketercapaian Kualitas Produk Hukum Provinsi dan Keselarasan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan Regulasi Hukum Nasional	%	100,00	50,00	50,00
Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase cakupan kegiatan akuntabilitas Kinerja (%)	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase cakupan kegiatan kelembagaan dan analisis jabatan (%)	%	100,00	50,00	50,00
		Persentase cakupan kegiatan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik (%)	%	100,00	70,00	70,00
		Persentase cakupan kegiatan reformasi dan Budaya Kerja (%)	%	100,00	50,00	50,00
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan realisasi Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	%	100,00	1,50	1,50
		Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	%	100,00	1,00	1,00
		Persentase Rumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	%	100,00	0,67	0,67

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Kebijakan Administrasi Kewilayahan	%	100,00	1,33	1,33
		Persentase realisasi kebijakan kerjasama pemerintahan	%	100,00	1,33	1,33
		Persentase realisasi kebijakan Otonomi Daerah	%	100,00	1,00	1,00
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Nilai	24,13	-	0,00
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Nilai	30,00	-	0,00
		Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	26,67	-	0,00
Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Tersedianya Dokumen Hasil Rekomendasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Sebagai Bahan Evaluasi	%	100,00	12,75	12,75
		Persentase Tersedianya Perumusan Kebijakan Administrasi Pembaangunan	%	100,00	10,77	10,77
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian Yang di Implementasikan	%	100,00	23,53	23,53
Biro Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase capaian tata kelola keuangan dan aset setda	%	100,00	40,00	40,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Capaian Database Aset Provinsi Banten	Persen	23,50	12,93	55,00
		Capaian Penertiban Aset Provinsi Banten	Persen	25,00	5,33	21,33
		Capaian Sertifikasi Aset Provinsi Banten	Persen	16,50	1,32	8,00
		Persentase Pengelolaan Aset Provinsi Banten	Persen	22,00	6,63	30,16
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persen	100,00	0,67	0,67
		Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah	Persen	100,00	28,57	28,57
		Persentase pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	Persen	100,00	11,83	11,83
		Persentase pengelolaan belanja daerah yang efektif dan efisien	Persen	100,00	17,00	17,00
BPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang pengembangan kompetensi	%	75,00	30,00	40,00
		Presentase Capaian pemantauan dan evaluasi, sertifikasi pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi	%	100,00	20,00	20,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Rasio ASN Provinsi Banten Yang Lulus Uji Kompetensi/ Sertifikas	%	100,00	30,00	30,00
		Rasio peserta pengembangan kompetensi Dasar, manajemen dan Kepemimpinan, serta Kompetensi Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	%	75,00	30,00	40,00
		Rasio peserta pengembangan kompetensi teknis umum, substantif, dan pemerintahan yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau STTPL	%	75,00	30,00	40,00
Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	%	17,86	8,80	49,26
	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	%	56,52	45,63	80,73
	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	%	17.000,00	-	0,00
		Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	%	77,17	78,42	101,62
	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	%	45,40	34,66	76,34

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luas Laut yang terawasi	Mil Persegi	500,00	255,00	51,00
		Pelaku usaha perikanan yang terawasi	Unit Usaha	50,00	20,00	40,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terehabilitasi dan terkonservasi	Hektar	2,00	1,00	50,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terlayani	Unit Usaha	50,00	27,00	54,00
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	111.563,00	49.170,41	44,07
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kapal Perikanan Tangkap yang direkomendasikan	Rekom	75,00	50,00	66,67
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	75.632,25	32.501,45	42,97
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Hasil uji mutu perikanan	Sampel	250,00	130,00	52,00
		Sertifikasi usaha pemasaran dan pengolahan perikanan	Sertifikat	150,00	270,00	180,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	%	21,93	32,45	147,97
		Prosentase Pembudayaan Masyarakat Olahraga	%	42,00	51,66	123,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Pembinaan Lembaga Olahraga	%	3,02	-	0,00
		Prosentase Peroleh Medali Emas Pada Event Nasional/ Internasional	%	10,00	-	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pemuda berprestasi dan pemuda yang mendapatkan pelayanan	%	14,66	12,82	87,45
		Prosentase pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	25,00	-	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Prosentase anggota pramuka yang mendapatkan pelayanan	%	81,97	-	0,00
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Kelompok Masyarakat	13,00	13,00	100,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYAAKAT	Cakupan Kualitas Keluarga Sehat	%	57,00	53,48	93,82
		Jumlah Parameter Laboratorium Kesehatan dan Laboratorium Kalibrasi yang Terakreditasi pada UPTD Labkesda	Parameter	118,00	137,00	116,10
		Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Provinsi yang Bermutu	Unit	239,00	239,00	100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Persentase Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sarana Sanitasi (Jamban)	%	86,00	86,00	100,00
		Persentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak dan Beresiko pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan	%	100,00	44,00	44,00
		Persentase RS Rujukan yang Terakreditasi	%	79,20	100,00	126,26
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	0,13	0,12	92,31
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang Direkrut dan Didistribusikan	Orang	470,00	470,00	100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan dan Masyarakat pada UPTD Pelatihan Kesehatan	Orang	300,00	160,00	53,33
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Kefarmasian dan Pengawasan Alat Kesehatan	%	100,00	89,00	89,00
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sarana Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	%	100,00	76,00	76,00
Dinas Kesehatan (RSUD Malimping)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian Variabel Indikator Keperawatan RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping	%	100,00	100,00	100,00
		Capaian Variabel Indikator Pelayanan Medis RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping	%	100,00	100,00	100,00
		Capaian variabel indikator Penunjang RSUD sesuai Standar Pelayanan Minimal pada UPT RSUD Malingping	%	100,00	100,00	100,00
Dinas Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	22,22	-	0,00
	PROGRAM PENGAWASAAN KEMANAAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	25,00	6,50	26,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100,00	-	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	%	85,00	-	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	100,00	-	0,00
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	%	90,91	90,91	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yg mencapai katagori INFORMATIF	%	39,39	-	0,00
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	100,00	-	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	54,60	-	0,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	%	100,00	-	0,00
Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan Diklat SDM perkoperasian	%	25,00	16,96	67,83
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang omsetnya meningkat	%	25,00	7,60	30,42
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang mendapatkan kemudahan Akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	%	100,00	40,00	40,00
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	%	25,00	12,75	51,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha kecil yang memperoleh kemudahan akses (Kemitraan, pasar, rantai pasok perbankan dan non perbankan)	%	5,00	1,88	37,58

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
Dinas Kesehatan (RSUD BANTEN)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase standar bagian pelayanan keperawatan sebagai rs pendidikan	%	100,00	85,00	85,00
		Persentase standar bagian pelayanan medis sebagai rs pendidikan	%	100,00	85,00	85,00
		Persentase standar bagian pelayanan sebagai rs pendidikan	%	100,00	85,00	85,00
		Persentase standar bagian penunjang sebagai rs pendidikan	%	50,00	48,00	96,00
		Persentase standar bagian penunjang logistik sebagai rs pendidikan	%	50,00	48,00	96,00
		Persentase standar bagian penunjang Rekam medis dan SIM RS sebagai rs pendidikan	%	50,00	48,00	96,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.Persentase Pengelolaan TAHURA Banten	Persen	100,00	7,00	7,00
		2.Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Lebak dan Tangerang	Kelompok	6,00	-	0,00
		3.Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Wilayah Pandeglang Serang Cilegon	Kelompok	6,00	-	0,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		4.Persentase Jumlah Kawasan Ekosistem Bernilai Penting yang Ditangani Per Tahun	Persen	21,43	16,07	75,01
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap aturan di bidang lingkungan hidup	Persen	80,00	29,04	36,30
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.Persentase Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti	Persen	100,00	50,00	50,00
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.Jumlah Kelompok Kehutanan yang diberikan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat per tahun	Kelompok	42,00	21,00	50,00
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1.Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persen	11,76	-	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1.Persentase Jumlah DAS yang ditangani per tahun	Persen	20,00	-	0,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.Persentase pencapaian perencanaan dan pemanfaatan hutan	Persen	25,00	-	0,00
		2.Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun wilayah lebak dan Tangerang	Ha	2.500,00	225,00	9,00
		3.Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	Ha	2.500,00	7,50	0,30
		4.Persentase Jumlah Bibit Tanaman Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan yang dibagikan ke masyarakat	Persen	90,00	37,63	41,81
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	1.Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persen	14,29	8,91	62,35
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.Prosentase penanganan Sampah sesuai kewenangan provinsi	Persen	100,00	50,00	50,00
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.Persentase Pengendalian Limbah B3 dan Limbah Non B3	Persen	100,00	50,00	50,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.Persentase Pencapaian pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	51,00	38,20	74,90
		2.Persentase Peningkatan Fungsi Laboratorium Lingkungan	Persen	21,00	9,00	42,86
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.Jumlah Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lembaga/Kab.kota	68,00	68,00	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.Prosentase lembaga masyarakat yang terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	100,00	-	0,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persen	100,00	33,45	33,45
Dinas Pariwisata Provinsi Banten	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Jumlah Promosi Wisata	%	100,00	27,78	27,78
		Prosentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	5,00	4,00	80,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rp	4.327.965,00	-	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase SDM yang Memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100,00	43,25	43,25
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata	%	100,00	40,00	40,00
		Rata – rata Lama Inap	Hari	1,66	1,63	98,19
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	%	63,64	2,59	4,07
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pengelolaan Gedung strategis Provinsi	%	85,71	13,35	15,57
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penyediaan IPAL D yang tersambung	%	1,61	-	0,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota	%	9,01	0,14	1,54
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	63,10	0,49	0,77
		Persentase Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air pada WS Cidurian-Cisadane	%	100,00	25,21	25,21
		Persentase Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air pada WS Ciliman-Cisawarna	%	100,00	37,19	37,19
		Persentase Operasi dan Pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air pada WS Ciujung-Cidanau	%	100,00	18,96	18,96
		Persentase penanganan abrasi	%	74,39	7,97	10,71
		Persentase penanganan banjir	%	43,20	4,47	10,34
		Persentase penanganan situ/embung	%	0,73	0,00	0,13
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Pengujian Bahan dan Konstruksi Bangunan	%	142,70	26,01	18,23
		Persentase pembinaan tenaga ahli konstruksi	%	21,69	5,24	24,15

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%	16,67	-	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional	%	0,26	-	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	94,00	14,62	15,55
		Persentase Jalan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	%	83,13	8,06	9,70
		Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	95,00	19,24	20,25
		Persentase Penyelesaian Jalan Baru	%	16,00	3,90	24,38
		Persentase penyelesaian simpang tidak sebidang	%	25,00	-	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketidak Sesuaian Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana tata Ruang	%	71,00	7,70	10,85
		Persentase Penyusunan Kajian Teknis Tata Ruang	%	20,00	0,70	3,49
		Persentase Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	100,00	22,07	22,07

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi administrasi pemerintahan desa sangat tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang	%	6,32	3,16	50,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat di desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang	Desa	69,00	34,50	50,00
	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Jumlah Kelembagaan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa	Desa	68,00	34,00	50,00
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase ketercapaian fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	%	100,00	50,00	50,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA [KS]	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Specific Fertility Rate/ASFR	Nilai	10,00	18,00	180,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA [KB]	Angka prevalensi kontrasepsi moden / Modern Contraceptive (mCPR)	%	60,91	57,40	94,24
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA	Indeks	72,51	59,13	81,55

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0 –17 tahun	%	98,00	95,23	97,17
		Persentase cakupan kepemilikan akta kematian pada seluruh peristiwa kematian	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	%	100,00	30,14	30,14
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan layanan pendaftaran penduduk	%	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja operasi APBD	%	7,50	12,40	165,33
		Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	%	17,65	17,65	100,00
		Persentase Kontribusi Perempuan dalam pemberdayaan Ekonomi	%	36,13	46,43	128,51
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Cakupan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang Memanfaatkan Data Kependudukan	%	19,51	14,63	74,99
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil kependudukan	%	100,00	100,00	100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pesentase Pengelolaan Sistem Data Gender	%	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median kawin pertama perempuan pada kelompok umur 10-49 tahun	Tahun	22,10	20,09	90,90
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Peningkatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	%	27,27	23,63	86,65
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	84,36	79,32	94,03
		Persentase cakupan anak korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase cakupan perempuan korban kekerasan dan perilaku salah lainnya yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100,00	100,00	100,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tingkat Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan NSPK	%	85,00	100,00	117,65

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	%	25,00	9,88	39,52
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi Sektor Unggulan yang ditindaklanjuti	%	45,45	31,82	70,01
		Persentase kegiatan usaha yang mendapatkan Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal	%	25,00	-	0,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Melaporkan Realisasi Penanaman Modal	%	25,00	6,02	24,09
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Pelaku Usaha Penanaman Modal	%	25,00	15,78	63,12
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola.	Persen	65,00	-	0,00
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi Pemenuhan Kebutuhan Pendidik per mata pelajaran	Persen	74,00	-	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Menengah / Sederajat	Persen	79,84	59,54	74,57
		Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah / Sederajat	Persen	60,18	75,49	125,44
		Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Lebak	Persen	52,60	51,59	98,08

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Pandeglang	Persen	59,30	2,44	4,12
		Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Serang, Kota Serang, Kota Cilegon	Persen	72,64	70,45	96,99
		Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kab. Tangerang	Persen	70,89	67,77	95,60
		Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Menengah di Wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang	Persen	78,05	79,78	102,22
		Cakupan Ketersediaan dan Penggunaan TIK Pendidikan	Persen	25,00	-	0,00
		Kualitas Pengelolaan Pendidikan Khusus	Kinerja	baik	baik	100,00
		Persentase lulusan SMK yang mendapatkan pekerjaan selama 1 tahun setelah kelulusan	Persen	19,72	-	0,00
		Presentase SMA di Provinsi Banten terakreditasi minimal B	Persen	76,00	73,00	96,05
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pertumbuhan Jumlah Pengunjung museum dan Taman Budaya provinsi	Persen	20,00	61,27	306,35
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kualitas pengembangan kebudayaan	Kinerja	sangat baik	sangat baik	100,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Khusus	Persen	51,90	-	0,00
		Tingkat Pelaksanaan Pengembangan kurikulum Muatan lokal pada Pendidikan Menengah	Persen	77,44	-	0,00
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang mendapatkan izin	Persen	100,00	-	0,00
Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan prasarana transportasi	%	50,00	31,27	62,54
		Persentase pelaksanaan MRLL dan penyediaan, pemeliharaan jalan	%	15,00	6,64	44,29
		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal	%	20,00	10,00	50,00
		Persentase Pemenuhan kebutuhan angkutan massal (UPT Pengelola Prasarana Perhubungan)	%	10,00	4,01	40,12
		Persentase pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan	%	100,00	40,00	40,00
		Persentase Peningkatan Keselamatan Lalulintas	%	20,00	11,43	57,14

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Persentase perencanaan transportasi yang diterapkan	%	50,00	38,46	76,92
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Pengendalian, Penertiban dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	%	100,00	39,41	39,41
		Persentase Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian	%	50,00	13,51	27,01
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan	%	100,00	2,05	2,05
		Persentase Ketersediaan dan Pengawasan Kepelabuhanan (UPT Pengelola Prasarana Perhubungan)	%	100,00	49,87	49,87
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	%	55,00	75,00	136,36
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	5,00	-	

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) Besar ,izin perluasan industri (IPUI) Bagi Industri Besar, izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Laju Pemasaran Produk Dalam Negeri	%	20,00	50,00	250,00
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Laju Pertumbuhan Sarana Distribusi Perdagangan	%	6,39	-	0,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100,00	50,00	50,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan Jumlah Industri di Provinsi	%	0,22	0,73	330,28
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (UPT PTSI)	Cakupan Pelayanan Pengembangan teknologi dan Standarisi Industri	%	55,00	100,00	181,82

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan urusan Perdagangan	%	40,00	100,00	250,00
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	5,00	3,65	73,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penyelesaian aduan konsumen yang dilayani dan ditangani	%	50,00	-	0,00
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (UPT PSMB)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	10,00	-	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indikator Program A Persentase Penambahan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	1,00	0,54	54,00
		Indikator Program B Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di Perpustakaan daerah	%	20,00	139,36	696,80
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indikator Program A Persentase arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	%	20,00	10,00	50,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Indikator Program B Persentase Peningkatan Pengguna layanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	%	20,00	25,93	129,65
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Peningkatan Arsip statis Hasil Alih Media	%	20,00	3,02	15,10
Dinas Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengamanan Produksi Tanaman pangan dari gangguan serangan OPT dan DPI (%)	%	95,00	95,00	100,00
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Penjaminan Keamanan Produk Hewan (Unit Usaha)	Unit Usaha	37,00	29,00	78,38
		Penurunan Jumlah kasus penyakit Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Jumlah Kasus)	Jumlah Kasus	22,00	13,00	59,09
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Infrastruktur Pertanian (KM)	KM	28,40	-	0,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Jumlah Sertifikasi Benih (sertifikat)	Sertifikat	409,00	179,00	43,77
		Peningkatan Produktivitas Daging domba (kg/ekor)	kg/ekor	12,95	12,56	97,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
		Peningkatan Produktivitas Daging kambing (kg/ekor)	kg/ekor	12,84	11,60	90,37
		Peningkatan Produktivitas Daging kerbau (kg/ekor)	kg/ekor	145,88	128,87	88,34
		Peningkatan Produktivitas Daging sapi (kg/ekor)	kg/ekor	230,06	216,05	93,91
		Peningkatan Produktivitas aren (Ton/ha)	Ton/ha	2,95	2,70	91,64
		Peningkatan Produktivitas cabai (Ton/ha)	Ton/ha	8,75	7,89	90,15
		Peningkatan Produktivitas Durian (Kg/pohon)	Kg/pohon	7,91	7,67	97,00
		Peningkatan Produktivitas Jagung (Kw/Ha)	Kw/Ha	4,22	3,92	93,00
		Peningkatan Produktivitas Kacang Tanah (Kw/Ha)	Kw/Ha	1,24	1,18	95,00
		Peningkatan Produktivitas kelapa (Ton/ha)	Ton/ha	0,77	0,69	89,57
		Peningkatan Produktivitas Padi (Kw/Ha)	Kw/Ha	5,20	5,04	97,00
		Peningkatan Produktivitas Pisang (Kg/rumpun)	Kg/rumpun	3,38	3,14	92,79
		Tersedianya bibit ternak ruminansia bemutu (ekor)	ekor	339,00	145,00	42,77
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani dari madya ke utama (kelompok tani)	Kelompok Tani	276,00	266,00	96,38

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rekomendasi izin usaha pertanian (sertifikat)	Sertifikat	229,00	89,00	38,86
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	Ha	219,00	-	0,00
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Presentase penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota	%	100,00	-	0,00
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Presentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	%	100,00	-	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Presentase Penyediaan Rumah korban bencana skala Provinsi	%	43,50	-	0,00
		Presentase relokasi rumah terdampak program Provinsi	%	25,00	-	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Pengembang Tingkat Kemampuan Menengah	%	100,00	-	0,00
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) permukiman	%	91,73	-	0,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	100,00	-	0,00
Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Mengalami Peningkatan dalam Berpartisipasi Sosial	Persen (%)	100,00	39,36	39,36
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	Persen (%)	100,00	70,73	70,73
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kabupaten/Kota	Persen (%)	100,00	-	0,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin yang Mendapatkan Jaminan Sosial	Persen (%)	100,00	16,96	16,96
		Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	Persen (%)	100,00	5,60	5,60
		Persentase Penanganan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Persen (%)	100,00	2,25	2,25
		Persentase Pengangkatan Anak antar WNI dan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Persen (%)	100,00	-	0,00

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Persen (%)	100,00	22,08	22,08
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	%	8,70	6,95	79,89
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pelatihan dan Kompetensi Kerja	%	6,64	2,27	34,19
		Persentase Produktivitas Tenaga Kerja	%	4,96	4,36	87,90
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kesempatan Kerja	%	13,61	11,40	83,76
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Kondisi Lingkungan Kerja	%	3,53	0,90	25,50
	ROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Hubungan Industrial	%	4,19	2,40	57,28
		Persentase Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	10,00	10,00	100,00
		Persentase Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja	%	10,00	10,00	100,00
Inspektorat Daerah Provinsi Banten	PROGRAM PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase ketercapaian Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100,00	70,59	70,59

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase ketercapaian penyelenggaraan pengawasan	%	100,00	41,86	41,86
		Persentase jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti	%	80,00	82,00	102,50
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Koordinasi dan Penanganan Bencana Kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi	%	100,00	100,00	100,00
		Cakupan Pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Trantibum	%	100,00	100,00	100,00
		Persentase Penegakan Perda Perkada	%	100,00	100,00	100,00
Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Capaian Kinerja Fungsi DPRD	Persen	100,00	31,48	31,48
		Capaian Prosentase Pelayanan Keprotokolan, Kehumasan dan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD	Persen	100,00	34,55	34,55

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	Capaian
Semua Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	100,00	45,80	45,80
Total Capaian						55,45

Tabel 3.7
Realisasi Capaian Anggaran Per Program Triwulan III Tahun 2023

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.127.897.674.431	1.722.287.726.236	55,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.450.000.000	3.146.043.085	42,23
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.650.000.000	756.175.350	45,83
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.280.000.000	268.379.108	20,97
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.100.000.000	1.905.631.010	46,48
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	420.000.000	215.857.617	51,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3.120.447.674.431	1.719.141.683.151	55,09
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	109.520.000.000	51.867.429.700	47,36

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.689.309.853.572	872.832.504.416	51,67
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	3.800.000.000	657.288.000	17,30
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	200.000.000	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.317.617.820.859	793.784.461.035	60,24
DINAS KESEHATAN	1.155.420.581.657	629.957.746.315	54,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.155.420.581.657	629.957.746.315	54,52
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.117.082.500	2.128.977.750	68,30
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	543.026.669.853	336.208.156.993	61,91
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	77.138.856.700	19.184.684.697	24,87

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	531.302.032.604	271.784.763.875	51,15
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	835.940.000	651.163.000	77,90
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.105.636.866.000	326.098.015.695	29,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.105.636.866.000	326.098.015.695	29,49
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	124.880.150.000	13.686.273.323	10,96
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	63.750.000.000	22.603.102.955	35,46
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	450.000.000	85.685.100	19,04
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	46.070.000.000	1.631.875.888	3,54
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	128.756.359.291	50.264.832.567	39,04

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	5.435.407.600	1.769.208.714	32,55
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.500.000.000	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.830.000.000	724.544.800	25,60
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	127.741.779.660	80.553.855.672	63,06
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	597.473.169.449	153.608.606.342	25,71
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	3.750.000.000	1.170.030.334	31,20
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	521.212.000.000	23.543.069.114	4,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	500.000.000	22.195.945	4,44
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200.000.000	-	-

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	100.000.000	19.800.000	19,80
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	200.000.000	2.395.945	1,20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	520.712.000.000	23.520.873.169	4,52
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	80.798.000.000	2.627.480.634	3,25
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	21.500.000.000	2.463.892.949	11,46
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	500.000.000	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	379.526.950.000	2.064.742.145	0,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.387.050.000	16.364.757.441	42,63
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	92.190.000.000	49.803.282.712	54,02

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	92.190.000.000	49.803.282.712	54,02
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	17.463.344.000	6.840.557.066	39,17
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.775.000.000	969.806.145	12,47
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.752.396.000	2.398.293.755	30,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.199.260.000	39.594.625.746	66,88
DINAS SOSIAL	112.528.000.000	50.190.936.666	44,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	112.528.000.000	50.190.936.666	44,60
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.949.750.000	1.433.761.635	73,54
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.199.863.800	1.108.072.849	92,35

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	75.000.000	-	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.815.389.700	25.391.278.007	54,24
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	53.054.802.500	16.401.418.282	30,91
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.433.194.000	5.856.405.893	62,08
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	87.498.000.000	55.631.138.715	63,58
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	87.498.000.000	55.631.138.715	63,58
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.567.060.000	2.412.889.375	67,64
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14.996.136.300	8.079.486.300	53,88
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.400.000.000	1.018.491.500	29,96

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	1.149.341.000	711.623.000	61,92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64.292.623.700	43.363.404.540	67,45
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	92.839.000	45.244.000	48,73
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	45.386.200.000	30.449.522.549	67,09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.264.915.000	907.535.772	40,07
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	750.000.000	200.881.772	26,78
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	850.000.000	534.483.560	62,88
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	560.000.000	132.901.221	23,73
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	104.915.000	39.269.219	37,43

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	36.237.885.000	24.857.125.144	68,59
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	880.000.000	521.054.322	59,21
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	7.548.424.000	5.511.636.489	73,02
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	200.000.000	79.772.893	39,89
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.494.955.000	1.374.365.026	55,09
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.545.590.000	15.453.810.850	71,73
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.251.728.000	537.470.179	42,94
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.317.188.000	1.379.015.385	59,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.883.400.000	4.684.861.633	68,06

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.194.400.000	3.736.084.219	71,93
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.124.000.000	824.346.774	73,34
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	565.000.000	124.430.640	22,02
DINAS KETAHANAN PANGAN	50.389.000.000	16.426.015.466	32,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	50.389.000.000	16.426.015.466	32,60
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.700.000.000	578.098.080	34,01
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	977.000.000	342.484.400	35,05
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1.320.000.000	32.918.000	2,49
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	24.292.579.300	2.439.160.181	10,04

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.099.420.700	13.033.354.805	58,98
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	77.660.000.000	49.935.251.706	64,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	11.169.448.000	5.532.524.549	49,53
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	2.996.540.000	1.378.320.847	46,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	703.650.000	340.796.000	48,43
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	958.788.000	637.070.820	66,45
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.510.470.000	3.176.336.882	48,79
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	66.490.552.000	44.402.727.157	66,78
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	916.000.000	257.577.150	28,12

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	468.000.000	193.868.400	41,42
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	384.546.000	40.428.360	10,51
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	551.000.000	270.834.155	49,15
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.819.445.000	6.813.528.600	87,14
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	128.419.200	122.309.200	95,24
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.901.057.000	1.201.045.236	63,18
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	735.000.000	426.542.880	58,03
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	744.000.000	417.805.760	56,16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	52.068.584.800	34.483.102.805	66,23

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	774.500.000	175.684.611	22,68
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32.129.000.000	18.142.025.065	56,47
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32.129.000.000	18.142.025.065	56,47
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.424.040.000	1.098.825.300	45,33
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	11.630.888.000	6.499.688.303	55,88
PROGRAM PENATAAN DESA	500.000.000	148.961.200	29,79
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.535.000.000	251.120.600	16,36
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.039.072.000	10.143.429.662	63,24
DINAS PERHUBUNGAN	72.735.000.000	45.562.477.315	62,64

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	72.735.000.000	45.562.477.315	62,64
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.580.000.000	464.524.140	29,40
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	1.050.000.000	496.280.290	47,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.355.695.000	25.841.577.983	67,37
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31.749.305.000	18.760.094.902	59,09
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	68.806.000.000	40.893.028.214	59,43
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	65.000.178.900	39.359.697.845	60,55
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	28.509.955.389	16.513.909.001	57,92
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.686.573.000	8.693.724.990	68,53

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.803.650.511	14.152.063.854	59,45
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.750.278.500	1.077.188.919	39,17
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.750.278.500	1.077.188.919	39,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.055.542.600	456.141.450	43,21
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.055.542.600	456.141.450	43,21
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	27.394.781.000	17.582.680.375	64,18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	27.394.781.000	17.582.680.375	64,18
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.310.474.100	997.253.646	76,10
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.892.154.000	1.374.167.121	47,51

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	584.160.000	458.899.550	78,56
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.499.874.000	2.294.256.189	65,55
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.073.763.000	426.905.667	39,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.034.355.900	12.031.198.202	66,71
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35.549.844.000	20.727.171.912	58,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	35.549.844.000	20.727.171.912	58,30
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.250.000.000	771.780.830	61,74
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	350.000.000	263.030.226	75,15
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	5.920.000.000	2.281.104.411	38,53

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.774.600.000	872.217.100	49,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.477.000.000	14.320.538.845	66,68
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	4.778.244.000	2.218.500.500	46,43
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	89.008.000.000	67.189.268.476	75,49
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	89.008.000.000	67.189.268.476	75,49
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.024.245.600	49.885.720.400	81,75
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.200.000.000	2.446.267.368	47,04
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.581.902.250	1.049.960.834	66,37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.201.852.150	13.807.319.874	65,12

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	28.996.000.000	17.075.320.466	58,89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.233.763.000	963.251.083	29,79
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.233.915.000	415.064.983	18,58
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	999.848.000	548.186.100	54,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	25.762.237.000	16.112.069.383	62,54
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	3.881.664.300	1.670.190.663	43,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.880.572.700	14.441.878.720	66,00
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	109.162.670.000	37.262.238.355	34,13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	109.162.670.000	37.262.238.355	34,13

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000	394.958.000	56,42
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.995.000.000	582.238.900	29,18
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8.937.286.000	2.516.208.371	28,15
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	35.565.006.200	653.043.810	1,84
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.613.405.900	725.042.300	44,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60.351.971.900	32.390.746.974	53,67
DINAS PARIWISATA	49.641.000.000	25.218.773.322	50,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	49.641.000.000	25.218.773.322	50,80
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.295.355.000	2.677.824.260	50,57

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.300.000.000	1.104.565.600	48,02
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.850.000.000	1.757.614.213	45,65
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.615.355.000	6.678.534.937	35,88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.580.290.000	13.000.234.312	66,39
DINAS PERTANIAN	119.095.000.000	66.724.570.868	56,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	119.095.000.000	66.724.570.868	56,03
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.100.000.000	491.925.125	44,72
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.373.542.000	1.795.244.104	53,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.635.086.500	43.811.446.850	65,75

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.073.562.600	1.071.830.700	13,28
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	32.295.008.900	14.629.608.089	45,30
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	7.367.800.000	4.854.730.000	65,89
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	250.000.000	69.786.000	27,91
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.158.000.000	25.400.857.954	57,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	44.158.000.000	25.400.857.954	57,52
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	2.340.000.000	1.198.154.949	51,20
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	606.695.000	256.072.000	42,21
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	17.299.549.000	8.128.992.930	46,99

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	579.237.000	373.779.230	64,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.332.519.000	15.443.858.845	66,19
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	90.291.000.000	29.410.029.330	32,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.268.315.600	3.996.817.260	43,12
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.100.000.000	588.117.788	53,47
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	710.000.000	297.480.880	41,90
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	950.000.000	248.508.803	26,16
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	460.000.000	211.669.971	46,02
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	2.200.000.000	893.867.386	40,63

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.848.315.600	1.757.172.432	45,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	81.022.684.400	25.413.212.070	31,37
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	300.000.000	171.660.000	57,22
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	600.000.000	270.586.160	45,10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.862.291.400	22.556.333.145	30,54
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	6.260.393.000	2.414.632.765	38,57
SEKRETARIAT DAERAH	259.793.000.000	152.423.229.696	58,67
SEKRETARIAT DAERAH	259.793.000.000	152.423.229.696	58,67
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	3.265.727.200	1.453.003.100	44,49

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1.000.000.000	185.535.377	18,55
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.950.224.285	885.108.144	45,38
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	19.480.000.000	13.521.636.778	69,41
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	3.350.000.000	1.518.157.385	45,32
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	2.819.183.000	1.022.162.297	36,26
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	226.736.795.264	133.417.471.365	58,84
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.191.070.251	420.155.250	35,28
SEKRETARIAT DPRD	488.912.000.000	301.072.793.199	61,58
SEKRETARIAT DPRD	488.912.000.000	301.072.793.199	61,58

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	248.784.775.000	157.813.229.704	63,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	240.127.225.000	143.259.563.495	59,66
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	54.461.000.000	32.799.174.476	60,23
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.550.000.000	1.450.971.920	40,87
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.550.000.000	1.450.971.920	40,87
PERENCANAAN	50.911.000.000	31.348.202.556	61,57
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.431.516.300	834.146.307	34,31
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.079.483.800	27.248.743.009	67,99
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	8.399.999.900	3.265.313.240	38,87

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.206.997.052.647	2.773.790.342.363	86,49
KEUANGAN	3.206.997.052.647	2.773.790.342.363	86,49
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11.094.129.000	2.059.886.998	18,57
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.156.650.622.973	2.745.577.588.927	86,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.252.300.674	26.152.866.438	66,63
BADAN PENDAPATAN DAERAH	310.815.000.000	202.134.874.292	65,03
KEUANGAN	310.815.000.000	202.134.874.292	65,03
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	23.068.622.652	10.542.857.052	45,70
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	287.746.377.348	191.592.017.240	66,58

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	65.584.000.000	27.565.987.952	42,03
KEPEGAWAIAN	65.584.000.000	27.565.987.952	42,03
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.746.607.800	4.954.998.882	50,84
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	55.837.392.200	22.610.989.070	40,49
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	53.982.000.000	32.462.325.110	60,14
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	53.982.000.000	32.462.325.110	60,14
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	19.842.919.400	9.784.682.977	49,31
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.139.080.600	22.677.642.133	66,43
BADAN PENGHUBUNG	13.254.000.000	7.779.417.100	58,69

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	13.254.000.000	7.779.417.100	58,69
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.583.391.830	1.968.005.123	54,92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.670.608.170	5.811.411.977	60,09
INSPEKTORAT	71.643.000.000	43.482.011.169	60,69
INSPEKTORAT DAERAH	71.643.000.000	43.482.011.169	60,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.868.778.000	42.037.696.619	66,87
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.789.982.000	1.199.164.550	15,39
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	984.240.000	245.150.000	24,91
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	106.425.621.000	80.424.900.168	75,57

PERANGKAT DAERAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
		RP	(%)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	106.425.621.000	80.424.900.168	75,57
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.560.000.000	770.245.487	49,37
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.923.996.300	2.214.900.834	75,75
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	6.212.583.055	4.225.726.280	68,02
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	35.621.423.828	32.459.342.180	91,12
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	38.172.070.000	29.366.179.501	76,93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	21.935.547.817	11.388.505.886	51,92
TOTAL	11.774.651.290.735	7.019.446.202.351	59,61

BAB IV

ANALISIS, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

4.1. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Tw III 2023

Berdasarkan pada bab III indikator kinerja daerah menunjukkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama daerah tahun 2023 terdiri atas 33 indikator berdasarkan dokumen RPD 2023-2026, adapun realisasi Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang telah tercapai sebanyak 19 indikator dan sebanyak 14 indikator berprogress untuk mencapai target di akhir tahun.

Beberapa hal yang bisa di analisis dari proses pencapaian target di tahun 2023 ini, sasaran daerah yang perlu penguatan adalah capaian makro daerah dan capaian yang berhubungan dengan pencapaian misi Tata Kelola Pemerintahan. Hal ini perlu dikuatkan dengan komitmen pimpinan dan fokus pada indikator yang progress pencapaiannya masih belum mendekati target 2023.

4.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah

A. Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Realisasi kinerja yang tersedia di Bab III, menunjukkan bahwa dari total Kinerja Urusan atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2023 sebanyak 92 indikator yang tersebar kinerjanya di berbagai Perangkat Daerah, dari 92 indikator tersebut terdapat 15 indikator yang telah tercapai targetnya di 2023, sebanyak 39 indikator yang dalam progress pencapaian di triwulan berikutnya atau di Triwulan IV dan ada 32 indikator yang belum bisa terhitung pencapaiannya pada periode triwulanan.

Adapun hal-hal yang perlu di perkuat dalam rangka mencapai target kinerja 2023 adalah belanja yang mendukung prioritas dan

target PD perlu dikuatkan dan di lakukan inovasi sehingga capaian kinerjanya bisa mencapai target. PD berfokus pada penghitungan kinerja sesuai dengan penghitungan DO (Definisi Operasional). Komitmen pimpinan juga perlu diperkuat dalam rangka dalam mencapai sasaran PD, pengendalian kinerja PD dilakukan di semua level dan pinpinan perlu memperkuat strategi serta rencana aksi kinerja untuk mencapai target kinerja pada 2023.

B. Berdasarkan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Realisasi kinerja Perangkat Daerah pada Triwulan III tahun 2023 berdasarkan capaian keuangan, Pada APBD 2023 Provinsi Banten Belanja APBD sebesar Rp.11.774.651.290.753,- dan terealisasi sebesar Rp.7.019.446.202.351 atau 59,61%, dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Realisasi Keuangan Per Bidang Urusan

Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Keuangan	Bidang Urusan
URUSAN DENGAN CAPAIAN (≥75)	1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2. PEMUDA DAN OLAHRAGA 3. KEUANGAN DAERAH
URUSAN DENGAN CAPAIAN (50≥75)	1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4. SOSIAL 5. TENAGA KERJA 6. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7. LINGKUNGAN HIDUP 8. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Katagori Penilaian Berdasarkan Persentase Realisasi Keuangan	Bidang Urusan
	9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11. PERHUBUNGAN 12. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 14. PENANAMAN MODAL 15. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16. STATISTIK 17. PERPUSTAKAAN 18. PARIWISATA 19. PERTANIAN 20. SEKRETARIAT DAERAH 21. SEKRETARIAT DPRD 22. PERENCANAAN 23. KEUANGAN 24. KEPEGAWAIAN 25. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 27. PENGELOLAAN PENGHUBUNG 28. INSPEKTORAT 29. ENERGI SUMBERDAYA MINERAL
URUSAN DENGAN CAPAIAN (25≥49)	1. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2. PANGAN 3. SOSIAL 4. KELAUTAN DAN PERIKANAN 5. KEPEGAWAIAN 6. PERDAGANGAN 7. PERINDUSTRIAN
URUSAN DENGAN CAPAIAN DIBAWAH 10%	1. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sumber:Hasil Olahan Bappeda

Tabel 4.1 menunjukkan realisasi keuangan dimana dengan capaian dibawah 10 persen sebanyak 1 Perangkat Daerah, dengan capaian 25 persen sampai dengan 49 persen sebanyak 7 Perangkat Daerah. Yang berada antara 50-75 persen sebanyak 29 perangkat daerah dan yang berada pada capaian diatas 75 persen ada 3 Perangkat Daerah.

Pada tabel 4.2. dibawah ini menunjukan capaian dari seluruh sub kegiatan yang dirata-ratakan per Perangkat Daerah dan capaian keuangan per perangkat daerah. Dari hasil capaian sub kegiatan dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Dinas Kelautan Perikanan masih berada pada urutan terbawah secara capaian sub kegiatan. Untuk OPD yang sampai saat ini belum mengumpulkan data adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan BPSDM

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Sub Kegiatan dan Keuangan Perangkat Daerah

NO	URAIAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN III	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III	CAPAIAN TRI III	
					KINERJA	KEUANGAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.151.437.894.231	2.146.064.899.716	1.587.371.501.717	40,60	73,97
2	Dinas Kesehatan	672.636.440.993	601.607.703.605	377.799.342.296	86,06	62,80
	UPT RSUD Malimping	140.148.463.092	120.171.147.386	82.884.489.533	96,95	68,97
	UPT RSUD Banten	369.871.216.684	260.169.350.563	175.940.574.013	57,42	67,63
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	521.212.000.000	395.159.540.352	23.543.069.113	11,06	5,96
5	Satuan Polisi Pamong Praja	49.994.000.000	41.390.691.844	27.601.553.433	60,07	66,69
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.196.000.000	35.840.149.965	21.814.333.176	31,17	60,87
7	Dinas Sosial	111.931.660.000	101.884.745.172	50.183.392.268	81,42	49,26
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	77.549.294.802	50.117.555.059	47.959.265.394	93,57	95,69

NO	URAIAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN III	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III	CAPAIAN TRI III	
					KINERJA	KEUANGAN
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	45.386.200.000	41.566.750.386	30.449.522.549	90,48	73,25
10	Dinas Ketahanan Pangan	50.389.000.000	44.915.959.537	16.502.338.289	70,35	36,74
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	77.660.000.000	62.382.650.172	53.920.978.479	93,44	86,44
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.129.000.000	28.766.973.609	18.142.025.065	55,99	63,07
13	Dinas Perhubungan	72.735.000.000	59.550.893.986	43.208.857.076	52,88	72,56
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	68.806.000.000	59.349.396.972	40.492.772.518	64,64	68,23
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.360.425.100	7.903.062.600	5.512.757.674	84,26	69,75
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.544.454.900	30.872.190.028	19.759.115.212	56,13	64,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	89.008.000.000	82.257.706.731	67.197.774.476	77,55	81,69
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36.111.467.300	23.169.603.740	16.616.827.666	54,10	71,72
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	109.162.670.000	84.073.946.995	37.245.614.131	19,74	44,30
20	Dinas Pariwisata	29.285.119.000	23.655.076.064	17.061.271.534	96,78	72,13
21	Dinas Pertanian	121.665.000.000	69.358.515.035	35.113.414.626	80,89	50,63
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	44.158.000.096	38.636.818.651	25.400.857.954	82,00	65,74
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	91.392.461.550	82.087.097.955	29.410.029.330	99,73	35,83
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	27.040.000.000	25.114.658.600	17.056.779.255	96,00	67,92
25	Biro Hukum	3.925.000.000	3.159.799.790	1.788.452.072	85,14	56,60
26	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	3.464.817.000	2.736.283.718	1.379.745.890	60,90	50,42

NO	URAIAN PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	TARGET ANGGARAN TRIWULAN III	REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III	CAPAIAN TRI III	
					KINERJA	KEUANGAN
27	Biro Umum dan Perlengkapan	202.104.224.715	156.811.033.095	121.474.596.799	70,50	77,47
28	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.354.164.285	3.589.701.325	2.500.726.298	84,22	69,66
29	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4.550.000.000	2.452.516.428	1.238.564.616	61,67	50,50
30	Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol	14.354.794.000	11.665.166.810	6.133.784.265	68,80	52,58
31	Sekretariat DPRD	488.912.000.000	291.162.681.832	182.667.905.753	56,88	62,74
32	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	54.461.000.000	44.817.902.638	32.799.174.476	83,59	73,18
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.206.997.052.647	3.193.032.478.005	2.773.790.342.363	46,40	86,87
34	Badan Pendapatan Daerah	310.815.000.000	255.804.923.059	202.134.874.292	57,96	79,02
35	Badan Kepegawaian Daerah	65.584.000.000,00	52.302.975.381,00	27.565.987.952,00	83,33	52,70
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
37	Badan Penghubung	13.254.000.000	10.834.464.451	7.485.264.338	75,00	69,09
38	Inspektorat	62.672.423.000	42.000.000.000	40.000.000.000	73,87	95,24
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	106.425.621.000	23.228.244.537	80.371.118.063	100,00	346,01
				Rata-rata capaian Kinerja	70,30	71,74

4.3. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2023 pada triwulan III secara umum menunggu APBD perubahan 2023 untuk disahkan, sebagai bagian efiseinsi anggaran, karena ada beberapa sub kegiatan yang di optimalisasi. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan sudah dilakukan implementasi kegiatan. Perangkat daerah selaku pelaksana Program Kegiatan mengupayakan agar pencapaian target kinerja dapat

dipenuhi secara berkualitas dan tepat waktu. Selain itu dalam rangka penggunaan produk dalam negeri juga untuk tahun ini masih menjadi hambatan karena barang yang dibeli belum banyak ada di e-katalog, dan selanjutnya dalam proses lelang juga masih mengalami kendala.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2023 yang merupakan komitmen dalam mengawal pencapaian Target Tujuan dan Sasaran Tahun 2023 - 2026 guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengukuran capaian indikator kinerja Tujuan, Sasaran Daerah, Sasaran PD, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten, diharapkan menjadi input dalam pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi atas kinerja yang hasilnya untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan periode selanjutnya.

Dalam Pelaksanaan RKPD tahun 2023 pada triwulan III secara umum kendala pada pengesahan APBD Perubahan tahun 2023, karena ada beberapa sub kegiatan yang di optimalisasi. Sebagian besar anggaran Program Kegiatan belum dapat direalisasikan karena menunggu perubahan APBD, selain itu Lelang yang menggunakan e-katalog dan Upaya penggunaan produk dalam negeri juga menjadi kendala pada pelaksanaan di TW III.

Dukungan dan kerjasama stake holder menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan. Sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan Program Pembangunan di Provinsi Banten, diharapkan perlu adanya peningkatan penyelarasan dan antisipasi kebijakan pada tahap perencanaan dan pengendalian antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat meminimalisir permasalahan keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 disusun, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembangunan triwulan selanjutnya.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023